

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

##### **1. Miranty Nurhayati (2012)**

Penelitian (Nurhayati, 2012) menggunakan LQ45 dengan nilai kapitalisasi pasar 45 saham yang paling likuid dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan, untuk menganalisis pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan, untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan, GCG, dan CSR terhadap nilai perusahaan secara keseluruhan. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif yang mengungkap besar atau kecilnya pengaruh atau hubungan antar variabel yang dinyatakan dalam angka-angka, dengan cara mengumpulkan data yang merupakan data yang memiliki faktor pendukung terhadap pengaruh variabel – variabel yang bersangkutan. Pemilihan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji regresi berganda. Penulis menggunakan Tobins'Q untuk mengukur nilai perusahaan dengan hasil tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan ROE dengan hasil signifikan terhadap nilai perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) diukur

dengan Kepemilikan Manajerial dengan hasil tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Persamaan :

1. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dan variabel dependen nilai perusahaan,
2. Nilai perusahaan diukur dengan formula Tobin's Q,
3. *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) diukur dengan membandingkan antara jumlah total kategori dengan 78 (item pengungkapan) yang terdapat di GRI,
4. Data penelitian dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
5. Menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda

Perbedaan :

1. Pada peneliti terdahulu terdapat penambahan pada variabel independen kinerja keuangan (ROE) sedangkan peneliti saat ini hanya menggunakan GCG dan CSR.
2. Peneliti terdahulu hanya menggunakan data yang terdaftar dalam LQ45 untuk peneliti saat ini dengan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013
3. Peneliti terdahulu mengukur *Good Corporate Governance* (GCG) hanya pengukuran kepemilikan manajerial, sedangkan peneliti saat ini menggunakan indikator ukuran pengukuran kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi komite audit, komposisi dewan komisaris independen, dan Frekuensi rapat dewan komisaris.

4. Penggunaan data pada tahun 2009-2011, sedangkan peneliti saat ini menggunakan tahun 2011-2013.

## **2. Reny Dyah Retno (2012)**

Penelitian (Retno, 2012) menggunakan variabel independen yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) dengan alat ukur *Corporate Governance Perception Index* (ICCG) dan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) diukur dengan berpedoman perhitungan index luas Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSRI) yang dikeluarkan oleh GRI sedangkan untuk variabel dependen yaitu nilai perusahaan diukur dengan menggunakan Tobins'Q. Penelitian ini penulis meletakkan variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan dengan alat ukur  $SIZE = \text{Log}(\text{Nilai buku total asset})$ , jenis industry dilihat berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh BEI yang termuat dalam *Fact Book* yang terbagi dalam 9 sektor, profitabilitas diukur dengan menggunakan formula ROA, leverage diukur dengan menggunakan DER.

Latar belakang penulis melakukan penelitian ini adalah karena timbul konflik antara manajerial dan pemegang saham atau sering disebut dengan *agency problem* untuk dalam nilai perusahaan, timbulnya *principal-agency theory* yang berarti upaya untuk mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntan bagi perusahaan secara menyeluruh. Tujuan dari peneliti ini yaitu untuk mendapatkan bukti empiris apakah GCG mempengaruhi nilai perusahaan dengan vairabel kontrol ukuran perusahaan dan leverage, mendapatkian bukti empiri apakah pengungkapan CSR mempengaruhi nilai

perusahaan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan jenis industry, profitabilitas, dan leverage, serta untuk mendapatkan bukti empiris apakah GCG dan pengungkapan CSR mempengaruhi nilai perusahaan. Populasi yang digunakan keseluruhan perusahaan *publik* yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 2007-2010. Peneliti menggunakan 2007 untuk pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) pada nilai perusahaan setelah diterbitkannya UU penanaman modal no. 25 tahun 2007/ dan UU perseroan terbatas no. 40 tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui situs BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website perusahaan. Untuk *corporate governance* menggunakan pengumuman hasil survey yang dilakukan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), diperoleh dari majalah SWA. Teknik analisis data terdiri dari statistic deskriptif dan uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian ini *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan leverage. Untuk Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, jenis industry, profitabilitas, dan leverage. Dan GCG dan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Persamaan :

1. Menggunakan variabel yang sama untuk independen dan dependent,
2. Data yang digunakan perusahaan yang terdaftar di BEI
3. Pengukuran variabel nilai perusahaan dengan menggunakan Tobin's Q

Perbedaan :

1. Pada peneliti terdahulu Menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dengan indicator CGPI terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan variabel kontrol *Size* dan *Leverage*, sedangkan peneliti saat ini dengan indikator ukuran pengukuran kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit independen, komposisi dewan komisaris independen, dan Frekuensi rapat dewan komisaris tanpa variabel kontrol
2. Peneliti terdahulu melakukan Pengujian pengaruh pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan variabel kontrol *Size*, Jenis Industri, *Profitabilitas*, dan *Leverage*, sedangkan peneliti saat ini tanpa menggunakan variabel kontrol.
3. Data yang digunakan peneliti terdahulu perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010, sedangkan peneliti saat ini pada tahun 2011-2013

### **3. Riha Dedi Priantan (2011)**

latar belakang penelitian dari (Priantana, 2011) adalah perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab untuk mencari keuntungan/laba semata (*Bottom line*), tetapi perusahaan juga dihadapkan pada konsep *Triple Bottom Line*, yaitu ekonomi, *sosial*, dan lingkungan. Tujuan peneliti ini untuk melihat seberapa luasnya item-item pengungkapan tanggung jawab social dan struktur *good corporate governance* pada perusahaan keuangan. Populasi yang digunakan perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 dan 2008.

Sampel diambil dengan metode *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu annual report yang dikeluarkan tahun 2007 dan 2008 yang diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) dan Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM), serta situs resmi di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Analisis dilakukan dengan metode regresi sederhana dan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 17.0. Penelitian ini menggunakan pengukuran untuk *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu kepemilikan manajerial dan institusional, komite audit independen, komisaris independen dengan hasil Kepemilikan institusional dan Komite audit independen tidak signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dan untuk ukuran dewan komisaris menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan. Terendah 2 dan tertinggi 8. Sedangkan Komposisi dewan komisaris yang menunjukkan jumlah anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan dari jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Terendah 20% dan tertinggi 80%. Dengan nilai rata-rata dewan komisaris 49,112%.

Persamaan :

1. Menggunakan variabel independen *Good Corporate Governanace* (GCG) dan variabel dependen *Corporate Sosial Rensponsibility* (CSR),
2. Pengukuran *Good Corporate Governanace* (GCG) dengan menggunakan kepemilikan manajerial dan institusional, komite audit independen, komisaris independen,
3. Data didapatkan dari BEI

Perbedaan :

1. Peneliti terdahulu hanya menggunakan variabel GCG dengan indicator ukuran pengukuran kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit independen, komposisi dewan komisaris independen. Sedangkan peneliti saat ini Terdapat Frekuensi rapat dewan komisaris pada pengukuran *Good Corporate Governance*,
2. Peneliti terdahulu menggunakan data hanya pada sektor keuangan, sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan.
4. Peneliti terdahulu dalam mengukur *Corporate Sosial Rensponsibility (CSR)* dengan total item pengungkapan 78 yang terdapat pada GRI 3.0, sedangkan peneliti saat ini menggunakan 81 item pada GRI 3.1

#### **4. Adventina Natalisa (2006)**

Penelitian (Natalisa, 2006) menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia tahun 2006 dengan menggunakan perusahaan non-Keuangan. Tujuan peneliti untuk mengetahui tingkat pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan yang diukur melalui kinerja perusahaan yaitu kinerja pasar dan kinerja keuangan. Sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Terdapat variabel independen pengungkapan *Corporate Sosial Rensponsibility (CSR)* dengan pengukuran dari GRI dan variabel dependen nilai perusahaan dengan pengukuran Tobin's Q dan ROE sebagai variabel kontrol untuk pengungkapan *Corporate Sosial Rensponsibility (CSR)* yaitu ukuran perusahaan. Sumber data dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)*. Hasil penelitian ini mengatakan

terdapat pengaruh tingkat pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan yang diukur melalui kinerja pasar. Sedangkan hipotesis kedua menunjukkan hasil bahwa tingkat pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan variabel kontrol kinerja keuangan. Sedangkan pada ukuran perusahaan dengan total asset yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Persamaan :

1. Menggunakan variabel independen *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dan Dependent nilai perusahaan,
2. Data didapatkan dari BEI,
3. Perhitungan nilai perusahaan dengan menggunakan Tobins'Q dan untuk *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) menggunakan pedoman GRI,

Perbedaan :

1. Pada peneliti terdahulu tidak terdapat variabel independen *Good Corporate Governanace* (GCG), sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel *Good Corporate Gorvernance* (GCG) dengan pengukuran kepemilikan manajerial, sedangkan peneliti saat ini menggunakan indikator ukuran pengukuran kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit independen, komposisi dewan komisaris independen, dan Frekuensi rapat dewan komisaris
2. Terdapat variabel kontrol ukuran perusahaan dan ROE yang digunakan peneliti terdahulu, pada peneliti saat ini tidak menggunakan variabel kontrol untuk pengukuran CSR.



3. Peneliti terdahulu Terfokus dengan perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada BEI, sedangkan peneliti saat ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013

**5. Destya Ramia Abriyani, Sudarso Kaderi Wiryono, and Erman Sumirat (2012)**

Penelitian (Destya Ramia Abriyani, 2012) ini menggunakan dua variabel independen *Good Corporate Governance* dengan indikator pengukuran kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit independen. Dan kinerja keuangan yang di ukur dengan pprofitabilitas, leverage Ukuran perusahaan merupakan variabel prediksi dalam pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu *corporate sosial responsibility* di ukur dengan menghitung berdasarkan *corporate sosial responsibility disclosure index (CSRDI)*. Data di peroleh melalui masing – masing industry telekomunikasi seperti : PT. Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT. XL Axiata Tbk (EXEL), PT. Mobile-8 Telecom Tbk (FREN), PT. Inovisi Infracom Tbk (INVS), PT. Indosat Tbk (ISAT), PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM). Hasil dari penelitian ini kepemilikan institusional, leverage, komisaris independen dan komite audit independen berdampak signifikan positif terhadap pengungkapan *corporate sosial responsibility*. Untuk profitabilitas berdampak negatif terhadap pengungkapan *corporate sosial responsibility*.

Persamaan :

1. Menggunakan variabel independen *good corporate governance* dan *corporate sosial responsibility*,

2. Indikator pengukuran untuk good corporate governance, yaitu kepemilikan manajerial, institusional, komite audit independen, dewan komisaris independen,
3. Pengukuran corporate *sosial* responsibility dengan menggunakan corporate *sosial* responsibility disclosure index (CSRDI).

Perbedaan :

1. Peneliti terdahulu menggunakan data berupa perusahaan telekomunikasi yang berada di Indonesia, sedangkan peneliti saat ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013
2. Terdapat variabel independen kinerja keuangan pada peneliti terdahulu, pada peneliti saat ini hanya menggunakan variabel independen hanya GCG dan CSR

**Tabel 2.1**

**Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu**

TAHUN	JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR PENGUKURAN	HASIL
2012	ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM LQ45 PADA TAHUN 2009-2011 / Miranty Nurhayati/ Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma	<b>Variabel Independen</b> 1. GCG 2. CSR 3. Kinerja Keuangan  <b>Variabel Dependen</b> Nilai perusahaan	1. GCG diukur dengan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor dengan membandingkan saham yang beredar di pasar 2. nilai perusahaan diukur dengan tobin's Q 3. kinerja keuangan dengan ROE 4. CSR diukur dengan membandingkan antara jumlah total kategori dengan 78 (item pengungkapan) yang terdapat di GRI	1. ROE menghasilkan signifikan terhadap nilai perusahaan 2. CSR dan GCG menghasilkan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

2012	<p>PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN <i>CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY</i> TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2010) / Reny Dyah Retno M. / Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta</p>	<p><b>Variabel Independen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GCG dengan variabel kontrol Size dan Leverage</li> <li>2. CSR dengan variabel kontrol Size, Jenis industri, Profitabilitas, dan Leverage</li> </ol> <p><b>Variabel Dependen</b> Nilai perusahaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. GCG diukur dengan instrument yang telah dikembangkan oleh IICG berupa corporate governance perception index (CGPI)</li> <li>2. CSR diukur dengan pengungkapan dengan pedoman GRI atau perhitungan CSRI</li> <li>3. Variabel kontrol diukur dengan ukuran perusahaan, jenis industri, profitabilitas, Leverage.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan leverage.</li> <li>2. Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, jenis industri, profitabilitas, dan leverage.</li> <li>3. GCG dan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan</li> </ol>
2012	<p>THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND FINANCIAL PERFORMANCE ON THE CORPORATE <i>SOSIAL RESPONSIBILITY</i> DISCLOSURE OF TELECOMMUNICATION COMPANY IN INDONESIA/ Destya Ramia Abriyani, Sudarso Kaderi Wiryono, and Erman Sumirat</p>	<p><b>Variabel independen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Good corporate goveranace</li> <li>2. Kinerja keuangan</li> </ol> <p><b>Variabel dependen</b> Corporate <i>sosial</i> reponsibility</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. GCG diukur dengan menggunakan pengukuran kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ukuran komite audit.</li> <li>2. Dan kinerja keuangan yang di ukur dengan pprofitabilitas, leverage</li> <li>3. CSR diukur dengan CSRDI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil dari penelitian ini kepemilikan institusional, leverage, komisaris independen dan komite audit berdampak signifikan positif.</li> <li>2. Untuk profitabilitas berdampak negatif terhadap pengungkapan <i>corporate sosial responsibility</i>.</li> </ol>

2011	<p>PENGARUH STRUKTUR <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> TERHADAP PENGUNGKAPAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> PADAPERUSAHAAN KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA / Riha Dedi Priantana / Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala</p>	<p><b>Variabel Independen</b> Sturktur GCG</p> <p><b>Variabel Dependen</b> Pengungkapan CSR</p>	<p>1. GCG diukur dengan kepemilikan manajerial perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen</p> <p>2. CSR diukur dengan lingkungan, energy, keselamatan, dan kesehatan kerja, tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum dengan total item pengungkapan 78</p>	<p>3. Kepemilikan manajerial signifikan pada pengungkapan CSR.</p> <p>4. Kepemilikan institusional dan Komite audit tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.</p> <p>5. Ukuran dewan komisaris menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris suau perusahaan. Terendah 2 dan tertinggi 8.</p> <p>6. Komposisi dewan komisaris yang menunjukkan jumlah anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan dari jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Terendah 20 persen dan tertinggi 80 persen Dengan nilai rata-rata dewan komisaris 49,112 persen.</p>
2006	<p>PENGARUH Tingkat Pengungkapan <i>Corporate sosial responsibility</i> (Csr) Terhadap Nilai Perusahaan/Adv entina Natalisa Supatmi Yeterina Widi</p>	<p><b>Variabel Independen</b> Tingkat Pengungkapan CSR</p> <p><b>Variabel Dependen</b> Nilai Perusahaan</p> <p><b>Variabel Kontrol</b> Ukuran Perusahaan</p>	<p>1. CSR diukur dengan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang dikeluarkan GRI yang terdiri dari 79 item.</p> <p>2. Nilai perusahaan diukur dengan Tobin's Q dan ROE</p> <p>3. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aset perusahaan.</p>	<p>1. Tingkat pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan berpengaruh signifikan diukur melalui kinerja pasar.</p> <p>2. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.</p>

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Teori Keagenan**

Menurut (Moeljadi, 2006) Teori agensi sebagai sebuah strategi dalam peningkatan nilai perusahaan, karena nilai perusahaan yang tinggi merupakan cita-cita semua pemilik. Teori agensi dalam manajemen keuangan membahas adanya hubungan agensi (Jensen & Meckling, 1976), yaitu hubungan mengenai adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan yang dilakukan oleh manajer. Pemisahan itu terjadi karena pemilik modal melakukan diversifikasi portofolio dengan mendelegasikan kewenangan dan pengambilan keputusan kepada manajer dalam mengelola sejumlah dananya (Crutchley and Hansen, 1989).

Teori agen dipandang lebih luas karena teori ini dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agen dimana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Teori keagenan ini muncul ketika terjadi kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Seorang manajer banyak mengetahui mengenai kondisi dan informasi yang terdapat pada perusahaan daripada pemilik perusahaan dengan pihak manajer berkewajiban memberikan informasi secara berkelanjutan dan transparan kepada pihak pemilik. Akan tetapi informasi yang diberikan oleh manajer terkadang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam perusahaan.

Konflik kepentingan antar manajer dan pemilik akan menimbulkan adanya biaya keagenan (*agency cost*).

*Agency cost* ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal, serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk "*bonding expenditure*" yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Selain *agency cost*, konflik yang terjadi adalah manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manager.

Teori *agency* menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu : 1) sifat manusia pada umumnya lebih mementingkan kepentingan sendiri dari pada kepentingan public (*self interest*), 2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan 3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi (Haris, 2004). Yaitu kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang telah dicapai dalam mengelola tanggung jawab dari sebuah perusahaan.

*Corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, komite audit, struktur

kepemilikan saham, frekuensi rapat pemegang saham. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran – sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004 dalam Irmala 2010).

### **2.2.2. Nilai Perusahaan**

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Bringham Gapensi, 1996), Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (*financing*), dan manajemen asset.

Menurut Fama (1978) dalam Untung wahyudi et.al, (2006), nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai aset perusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat diukur menggunakan perhitungan Tobins'Q yang mana mengandung unsur dari *closing price* dikali dengan jumlah saham

beredar ditambah dengan hutang kemudian dibagi dengan nilai buku dari total ekuitas ditambah dengan hutang menurut James Tobin sebagaimana yang dikutip oleh Carton dan Perluff 2007 dalam Juniarti (2009 : 22)

### **2.2.3. Corporate Governance**

#### **1. Teori Pengertian Corporate Governance**

Terdapat beberapa prinsip dalam implementasi *good corporate governance* (GCG). Menurut pedoman umum *good corporate governance* Indonesia (OECD *Business Sector Advisory Group on Corporate Governance*, 1998) terdapat lima prinsip utama yang terkandung dalam *good corporate governance* yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*. dipublikasikannya berbagai prinsip *good corporate governance* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD)

Beberapa ilmuwan memiliki definisi masing masing mengenai *Corporate Governance* yang mana memiliki pengertian yang sama yaitu tata kelola yang baik dengan tujuan keberlangsungan perusahaan agar tetap berdiri sepanjang waktu (*Going Concern*). Berikut organisasi yang memiliki pandangan mengenai *Corporate Governance*

(OECD *Business Sector Advisory Group on Corporate Governance*, 1998)  
 “*corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance*”

OECD melihat *Corporate Governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *Corporate Governance* menjelaskan distribusi hak-hak



dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain Dewan Komisaris dan Direksi, Manajer, Pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Selanjutnya, struktur dari *Corporate Governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik.

Dari pemaparan diatas tersebut penulis menarik garis besar dari definisi GCG atau *Good Corporate Governance* yaitu bentuk tata kelola atau penerapan kebijakan perusahaan yang diterapkan untuk ditunjukan keberlangsungan perusahaan dengan menghubungkan emegang Saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern.

*Good Corporate Governanace* (GCG) diterapkan oleh perusahaan dengan tujuan perusahaan memiliki keberlanjutan didalam pengelolaan menejemen yang terdapat pada perusahaan. dimana hal ini dipengaruhi oleh keadaan financial dan non financial. Kegagalan mempertahankan going concern dapat mengancam setiap perusahaan, terutama diakibatkan oleh manajemen yang buruk, kecurangan ekonomis dan perubahan kondisi ekonomi makro seperti merosotnya nilai tukar mata uang dan meningkatnya inflasi secara tajam akibat tingginya tingkat suku bunga.

## **2. Prinsip-Prinsip *Corporate Governance***

Terdapat beberapa prinsip dalam implementasi *good corporate governance* (GCG). Menurut pedoman umum *good corporate governance* (GCG) Indonesia, terdapat lima prinsip utama yang terkandung dalam *good corporate governance*

yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* serta *fairness* (Zarkasyi, 2008:45) Berikut penjabaran mengenai lima prinsip utama yang terkandung dalam GCG :

**a. Transparansi (*Transparency*)**

Prinsip dasar, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang – undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

**b. Independensi (*Independency*)**

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governanace* (GCG), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

**c. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Prinsip ini memuat Perusahaan harus dapat bertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

**d. Pertanggung-jawaban (*Responsibility*)**

Prinsip ini menuntut perusahaan harus mematuhi peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.

**e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)**

Mensyaratkan melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

**2.2.4. Struktur Kepemilikan Saham**

Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara insiders dan outsiders melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal.

Struktur kepemilikan sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan. Dua aspek yang perlu dipertimbangkan ialah (1) konsentrasi kepemilikan perusahaan oleh pihak luar (*outsider ownership concentration*) dan (2) kepemilikan perusahaan oleh manajer (*manager ownership*). Pemilik perusahaan dari pihak luar berbeda dengan manajer karena kecil kemungkinannya pemilik dari pihak luar terlibat dalam urusan bisnis perusahaan sehari-hari (Widyastuti, 2004).

Struktur kepemilikan saham terbagi menjadi 2 yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam perusahaan.

### **1. Kepemilikan Institusional**

Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga 40% biasanya institusi menyerahkan tanggungjawab pada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Karena institusi memantau secara profesional perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Arif, 2006 dalam Novita dan Djakman, 2008). Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan peningkatan unsur nilai perusahaan. pengukuran kepemilikan institusional dirumuskan dengan kepemilikan saham yang dimiliki insititusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar (ismiyanti dan hanafi 2003)

### **2. Kepemilikan Manajerial**

Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Ety Murwaningsari, (2009) kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Hal tersebut disebabkan manajer

mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer tersebut, karena pengeluaran tersebut akan menambah biaya perusahaan yang menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan penurunan deviden yang akan diterima. pengukuran manajerial menggunakan kepemilikan saham yang dimiliki manajer, karyawan, direktur, komisaris dibagi dengan jumlah saham yang beredar (susiana dan herawaty 2007).

### **2.2.5. Komite Audit Independen**

(Zarkasyi, 2008) mengatakan bahwa berdasarkan kerangka dasar hukum di Indonesia perusahaan perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur publik merupakan perusahaan milik masyarakat luas. Komite audit didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

1. komite audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan, dan penjelasannya, system pengawasan internal serta auditor independen (Collier, 1999; FCGI, 2002;11)
2. komite audit adalah suatu komite yang anggotanya merupakan anggota yang Dekom yang terpilih yang pertanggungjawabannya antara lain: membantu menetapkan auditor independen terhadap usulan manajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari 3 sampai 5 kadang – kadang 7 orang yang bukan merupakan bagian manajemen perusahaan (Arens at al, 2006:124)

berdasarkan dari pemaparan diatas tersebut maka penulis menarik garis besar dari pengertian komite audit, suatu kelompok atau departemen yang tidak

memiliki keterkaitan secara langsung dengan perusahaan atau pihak manajemen yang memiliki sudut pandang lain mengenai akuntansi atau hal-hal yang terkait dengan pengendalian internal.

Kebanyakan komite audit terdiri dari 3 sampai 5 kadang – kadang 7 orang, tiga anggota yang mayoritas independen, yaitu sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan (Arens et al, 2006:124).

Dalam kaitan dengan penerapan *Good Corporate Governanace* (GCG), membangun peran komite audit yang efektif tidak dapat terlepas dari kacamata penerapan prinsip *Good Corporate Governanace* (GCG) secara keseluruhan di suatu perusahaan dimana independensi, transparansi, dan disklosur, akuntabilitas dan tanggung jawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan perusahaan. Komite audit diukur melalui komposisi komite audit independen dengan rumus jumlah komposisi komite audit independen dibagi dengan jumlah seluruh anggota komite audit didalam perusahaan.

#### **2.2.6. Dewan Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). komposisi dewan komisaris independen ini mampu melakukan pengawasan kepada strukturisasi dibawah mereka dengan baik karena mereka tidak memiliki kepentingan didalam

perusahaan tersebut (*Independent*).

Menurut Zakarsyi (2008, 110) dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada direksi. Untuk lebih memantapkan efektivitas komisaris independen, jumlah komisaris independen paling sedikit 30% dari seluruh jumlah komisaris atau paling sedikit 1 (satu) orang (tertera pada peraturan dalam surat direksi nomor kep-305/BEJ/07/2004) (Munaf, 2008 : 7). Menurut Munaf (2008 : 29) terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi tingkat efektifitas dewan komisaris, yaitu independensi, aktivitas dan remunerasi. Independensi akan timbul dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan. Peran dari dewan komisaris *corporate governance* menjadi lebih penting semenjak adanya krisis moneter.

Penelitian ini menggunakan indikator sesuai dengan penelitian (Priantana, 2011) yaitu menggunakan proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan. komisaris independen diukur melalui komposisi komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris yang terdapat pada perusahaan.

### **2.2.7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Frekuensi rapat dewan komisaris merupakan rapat yang dilakukan dewan komisaris dalam suatu perusahaan selama satu tahun (*Corporate Governance Guidelines*, 2007). Frekuensi rapat dewan komisaris ini mampu mengetahui tatakelola perusahaan dengan melalui koordinasi seperti hanya rapat yang

diadakan dalam setahun oleh pihak internal dewan komisaris, dengan ini mampu melakukan pengawasan kepada dewan direksi ataupun manajemen setiap waktu dan dapat memberhentikan untuk sementara waktu seseorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi perusahaan, dan selanjutnya pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut. Menurut (FCGI, 2002) Frekuensi rapat dewan komisaris diukur dengan cara melihat berapa rapat yang diadakan oleh dewan komisaris internal selama satu tahun yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan.

### **2.2.8. Corporate Social Responsibility (CSR)**

#### **1. Pengertian dari Corporate Social Responsibility (CSR)**

Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun isi Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan CSR, yaitu:

Pada pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan pada pasal 25 (b) Undang – Undang Penanaman Modal menyatakan kepada setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kedua pasal diatas dapat kita lihat bagaimana pemerintah Indonesia berusaha untuk mengatur kewajiban pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) oleh perusahaan atau penanam modal.

Perusahaan seringkali mengutamakan mencari sebuah keuntungan yang diperuntukan kekayaan pribadi dari perusahaan itu sendiri tanpa memikirkan lingkungan sekitar baik dari kesehatan, pendidikan, perekonomian, serta keadaan sosial disekitar wilayah perusahaan.

Munculah teori mengenai pengertian *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yaitu basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat. Secara teoretik, *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic-stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah golden-rules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin

diperlakukan. Perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

## **2. Indeks Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting* atau *Corporate social responsibility*. pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan), di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham (Gray *et. al.*, 1987 dalam Sembiring, 2005).

Menurut (Gray *et. al.*, 1987 dalam Sembiring, 2005) ada dua pendekatan yang secara signifikan berbeda dalam melakukan penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mungkin diperlakukan sebagai suatu suplemen dari aktivitas akuntansi konvensional. Pendekatan ini secara umum akan menganggap masyarakat keuangan sebagai pemakai utama pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan cenderung membatasi persepsi tentang tanggung jawab sosial yang dilaporkan.

Pendekatan alternatif kedua dengan meletakkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu pengujian peran informasi dalam hubungan masyarakat dan organisasi. Pandangan yang lebih luas ini telah menjadi

sumber utama kemajuan dalam pemahaman tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sekaligus merupakan sumber kritik yang utama terhadap pengungkapan tanggung jawab *sosial* perusahaan.

Penelitian ini menggunakan metode *checklist*. *Checklist* dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab *sosial* perusahaan dalam tujuh kategori yaitu: ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, *sosial* dan produk. Kategori ini diadopsi dari *global reporting report* Indonesia yaitu pedoman laporan keberlanjutan GRI G3.

*Global Reporting Index* (GRI) sendiri adalah sebuah pedoman atau standar pengukuran pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) oleh perusahaan. Standar GRI ini meliputi 6 aspek, yaitu: Aspek Ekonomi, Aspek Lingkungan, Aspek Tenaga Kerja dan Kepatuhan Kerja, Aspek Hak Asasi Manusia, Aspek Masyarakat, dan Aspek Tanggung jawab Produk. Pedoman ini telah dikembangkan melalui proses multi *stakeholder* yang menggabungkan partisipasi aktif bisnis,, investasi akuntansi, penelitian hak asasi manusia, dan organisasi tenaga kerja dari seluruh dunia.

Masing – masing standar pengungkapan tersebut memiliki beberapa aspek yang harus diungkapkan dalam laporan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) perusahaan. Aspek – aspek dari masing – masing standar dijabarkan dalam lampiran.

### **2.2.9. Hubungan Kepemilikan Institusional Dengan Nilai Perusahaan**

(Arif, 2006 dalam Novita dan Djakman, 2008) Kepemilikan Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang

dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga 40% biasanya institusi menyerahkan tanggungjawab pada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut akan terawasi oleh pemilik institusi yang bersifat independen sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan dimata investor dari segi kepercayaan.

(Murwaningsari, 2006) Hasil penelitian Steiner (1996) seperti yang dikutip oleh Machfoedz (2003) memberikan bukti bahwa kepemilikan institusional dan nilai perusahaan (Tobin's Q) memiliki hubungan yang signifikan. Penelitian Suranta dan Machfoedz (2003) juga menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Larasanti (2011), kepemilikan institusional belum berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. Faizal (2005) menemukan bahwa kepemilikan institusional belum efektif untuk memonitor manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional gagal menjadi mekanisme meningkatkan nilai perusahaan.

#### **2.2.10 Hubungan Kepemilikan Manajerial Dengan Nilai Perusahaan**

Penelitian-penelitian mengenai struktur kepemilikan dan nilai atau kinerja perusahaan memperhatikan dua hal yaitu masalah endogenitas dan bentuk hubungan empiris antara nilai perusahaan dan struktur kepemilikan. Ketika perangkat data diubah, hubungan antara dua variabel tersebut pun terus berubah, maka masih belum dapat dikatakan secara pasti. Namun secara keseluruhan para

peneliti menyatakan bahwa pemegang saham besar (*large shareholders*) lebih mudah memonitor tim manajemen, sehingga meningkatkan nilai perusahaan.

(Murwaningsari, 2006) Jensen and Mackling, (1976) dalam Isshaq Zangina, (2009) berpendapat bahwa peningkatan kepemilikan manajerial yang lebih baik dapat menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Demzet dan Villalonga (2001) dalam Christian Herdinata (2007) mengemukakan bahwa struktur kepemilikan ditentukan secara endogen, sehingga struktur kepemilikan yang tersebar mungkin membawa masalah keagenan, tetapi sekaligus keuntungan yang dapat menjadi kompensasi masalah keagenan.

### **2.2.11 Hubungan Komite Audit Dengan Nilai Perusahaan**

Jika kualitas dan karakteristik komite audit dapat tercapai, maka transparansi pertanggung jawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Selain itu, tanggung jawab komite audit dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya terhadap perusahaan. (Retno, 2012) mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh positif antara komite audit dengan nilai perusahaan. Dengan adanya komite audit, diharapkan dapat mengurangi konflik agensi sehingga laporan yang disampaikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dapat dipercaya sehingga dapat membantu nilai perusahaan di mata investor.

### **2.2.12 Hubungan Dewan Komisaris Independen Dengan Nilai Perusahaan**

(OECD *Business Sector Advisory Group on Corporate Governance*, 1998) Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan pedoman tentang Komisaris Independen yang ada di perusahaan publik. Bagian IV.C dari pedoman tersebut menyebutkan bahwa pada prinsipnya Komisaris bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, jika diperlukan. Untuk membantu Komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, maka seorang Komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan/atau membentuk komite khusus. Setiap anggota Komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya

Dewan komisaris independen adalah sejumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan. Jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris independen melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan yang semakin baik.

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Dewan komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Retno, 2012) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen merupakan salah satu mekanisme

*corporate governance* yang mampu meningkat nilai perusahaan. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat memantau dan meningkatkan perusahaan dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG).

### **2.2.12 Hubungan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Independen Dengan Nilai Perusahaan**

Rapat dewan komisaris independen didalam jumlah rapat yang diadakan oleh pihak internal dewan komisaris mampu mengetahui sebarapa pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap dewan direksi ataupun komite audit yang mana berhubungan dengan nilai perusahaan jika pengawasan yang baik dilakukan maka mampu meningkatkan nilai perusahaan melalui laporan yang diberikan oleh dewan komisaris kepada pemegang saham perusahaan yang terlibat.

Wewenang dari dewan komisaris Melalui rapat Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan, dan selanjutnya pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut. Frekuensi rapat dewan komisaris akan membantu meningkatkan nilai perusahaan di sudut pandang investor bahwa perusahaan tersebut memiliki tata kelola yang baik dan disiplin berharap investor akan menginvestasikan dana yang dimiliki investor kepada perusahaan tersebut.

### **2.2.13. Hubungan Pengungkapan *Corporate social responsibility* dengan Nilai Perusahaan**

*Corporate social responsibility* dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha menjadi lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Substansi keberadaan *Corporate social responsibility* sesungguhnya adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan dengan menyusun program – program pengembangan masyarakat sekitar.

Penerapan *Corporate sosial responsibility* bagi perusahaan akan meningkatkan citra perusahaan sehingga loyalitas konsumen akan semakin tinggi. Meningkatnya loyalitas konsumen berdampak pada meningkatnya penjualan perusahaan dan profitabilitas perusahaan serta meningkatkan daya Tarik perusahaan dimata investor dan analisis keuangan yang berarti semakin tingginya nilai perusahaan. Sehingga *Corporate sosial responsibility* mempunyai peran penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan.

Menurut penelitian terdahulu achmad dan robila, menyatakan bahwa *Corporate sosial responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pada penelitian reny dan denies, menyatakan bahwa *Corporate sosial responsibility* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dengan variabel *kontrol* ukuran perusahaan, jenis industri, profitabilitas, dan leverage pada perusahaan.

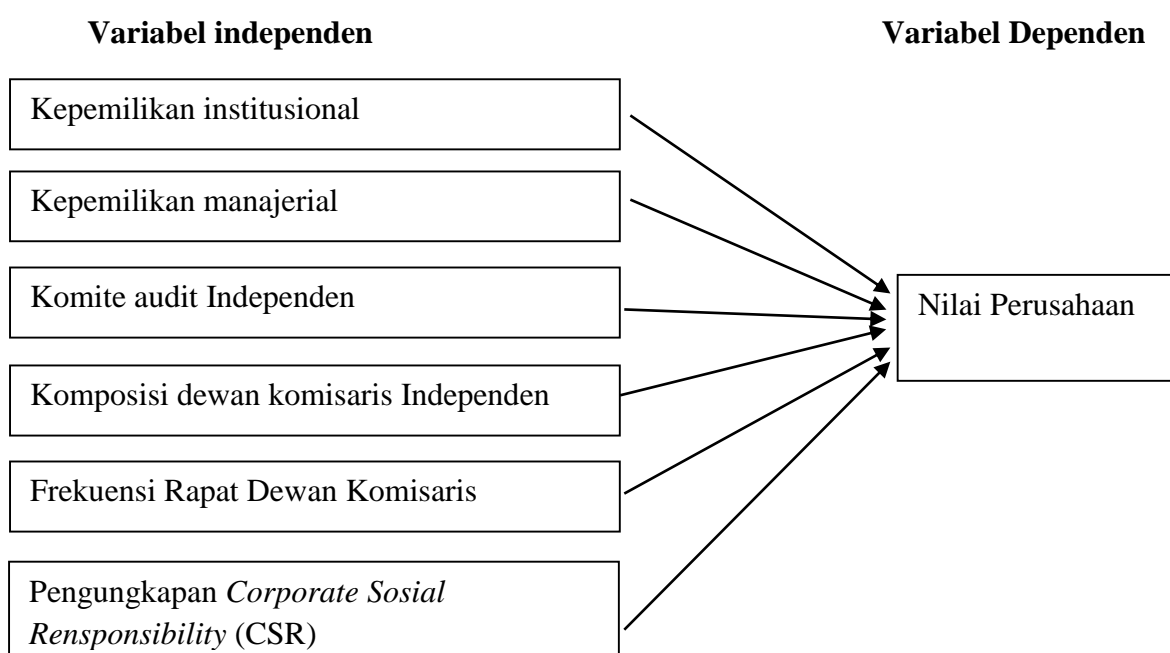


### 2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan guna menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) terhadap Nilai Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013.

**Gambar 2.2**

#### **Kerangka Pemikiran**



### 2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Ukuran Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
- H2 : Ukuran Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
- H3 : Komite audit Independen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
- H4 : Dewan komisaris Independen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
- H5 : Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

H6 : Pengungkapan *Corporate sosial responsibility* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.